

**BADAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH**



RENCANA KERJA TAHUN 2025



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

bpsdm@sulbarprov.go.id
www.bpsdm.sulbarprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan. Rancangan Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah tahun 2025.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Semoga segala daya dan upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan perlindungan dan ridha Allah SWT.

Mamuju, 3 Juni 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Barat,



Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19690610 199503 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
III.3. Program dan Kegiatan	35
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V : PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja PD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah, diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pemikiran di atas maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2024 menyusun Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025. Renja PD merupakan dokumen Rencana Pembangunan PD jangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mencapai tujuan dalam Rencana Strategis BPSDM Tahun 2023-2026 serta mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 yaitu :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa”.

Dengan sasaran strategis ke-11 yaitu :

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing”.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025.

I.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Sumber

Daya Manusia (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 2);

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor)

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2025;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD ditahun selanjutnya.

Adapun tujuan dari Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah;

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2. Terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2025;
3. Meningkatnya capaian target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Renja PD Tahun Anggaran 2025, mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja PD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 dan Tahun 2024 (Semester I) Provinsi Sulawesi Barat pada tabel II.1.

**REKAPITULASI EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
	Badan Pengembangan SDM									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	75	80	70	79,5	113,6		79,5	106
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	30	29	29	27	93,1	29	29	96,67
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		2	2	100,0	4	6	75,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	2					2	50,00

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4		1	1	100,0		1	25,00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		1	1	100,0		1	25,00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	1					1	25,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4						0	0,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4						0	0,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	99	99	99	99	100,0	99	99	100,00
					Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	99					98	98	98,99
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	174	41	41	41	100,0	40	122	70,11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	1	1	1	100,0		2	50,00
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4						0	0,00

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	56	14	14	14	100,0	14	42	75,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup SKPD (Persen)	100	90	100	100	100,0	100	100	100,00
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	202					116	116	57,43
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	41	37	41	41	100,0	6	84	204,88
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	100	100	100	100,0	100	100	100,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		2	2	100,0	10	12	100,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	12	5	3	3	100,0	50	58	483,33
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	20	4	4	100,0	4	28	233,33
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	2	2	2	100,0	10	14	116,67
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	5					2	2	40,00
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	11	20	20	100,0	40	71	591,67
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	280	110	50	50	100,0	20	180	64,29

			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4					4	4	100,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100,0	100	100	100,00
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	8						0	0,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	100	100	100	100,0	100	100	100,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	400	100	100	100	100,0	5	205	51,25
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	16	12	4	4	100,0	4	20	125,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15					4	4	26,67
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	100	100	100	100,0	100	100	100,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	124	24	43	43	100,0	20	87	70,16
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12		3	3	100,0		3	25,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	10	-	10	10	100,0		10	100,00
			Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang)	640	320	235	235	100,0	80	635	99,22

			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang)	640	320	235	235	100,0	80	635	99,22
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional (Orang)	950	662	40	40	100,0	40	635	66,84
				Jumlah Akreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi (Sertifikat)	8		1	1	100,0	4	5	62,50
				Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi (Orang)	180		80		0,0	100	100	55,56
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	170	20					20	11,76
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	8	4	1	1	100,0	3	8	100,00
			Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga (Dokumen)	20	5	5	5	100,0		10	50,00
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	950	435	40	40	100,0	40	515	54,21

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79); dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang menjelaskan tentang tugas pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yaitu melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan Teknis, Rencana, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas, maka untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup OPD;
2. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemprov. Sulbar

3. Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN

Dari Indikator Kinerja diatas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada aparatur sehingga apa yang dicita-citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang Pengembangan SDM dapat terwujud.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat

merumuskan isu-isu strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Belum tersedianya gedung Pusdiklat yang representatif;
2. Jumlah Akreditasi Penyelenggaraan Program Pelatihan yang masih terbatas;
3. Belum maksimalnya koordinasi pengembangan kompetensi antar perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Barat;
4. Belum maksimalnya jumlah tenaga Widyaiswara;
5. Belum memadainya dukungan anggaran BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN;
6. Belum tersedianya pedoman dan dokumen rencana pengembangan SDM;
7. Belum maksimalnya fungsi Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) di Provinsi Sulawesi Barat;
8. Belum maksimalnya kompetensi sumberdaya manusia bidang Penyelenggaraan Kediklatan di Provinsi Sulawesi Barat;
9. Belum maksimalnya sinergitas Penyelenggaraan Pengembangan SDM antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Barat;
10. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur

Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen Pengembangan SDM adalah:

1. Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPSDM;
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Aparatur Provinsi Sulawesi Barat;

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Meningkatkan Pengelolaan Organisasi Lingkup BPSDM;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan, jumlah akreditasi lembaga dan program pelatihan serta jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi;

Sedangkan kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah:

1. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup BPSDM;
2. Peningkatan Pengelolaan Tata Laksana Lingkup BPSDM;
3. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup BPSDM;
4. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Lingkup BPSDM;
5. Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Aparatur;
6. Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional SDM Aparatur;
7. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur melalui Sertifikasi Kompetensi;
8. Mewujudkan BPSDM sebagai penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang terpercaya.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Barat

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				12.438.053.701	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				12.438.053.701	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Lingkup BPSPDM	72	6.308.053.701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Lingkup BPSPDM	72	6.308.053.701	
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persentase)	99				Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persentase)	99		
			Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (poin)	80				Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (poin)	80		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	28,3 Poin	36.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	28,3 Poin	36.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Laporan	2.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	
7	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7 Data	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7 Data	2.000.000	
7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Berita Acara	25.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Berita Acara	25.000.000,00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	99 Persen	5.199.053.701	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	99 Persen	5.199.053.701	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	5.098.053.701	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	5.098.053.701	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	90.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	90.000.000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	2.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	2.000.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.000.000	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1.000.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD	100 Persen	11.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD	100 Persen	11.000.000	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.000.000	
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	
6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.000.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	100 Persen	291.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	100 Persen	291.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56 paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56 paket	20.000.000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.000.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	250.000.000	
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		umlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60 Orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		umlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60 Orang	10.000.000	
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang	20.000.000	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	100 Persen	357.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	100 Persen	357.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	50.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	6 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	6 Paket	6.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	30 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	30 Paket	30.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10 Paket	10.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	50 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	50 Dokumen	10.000.000	
7	Penyediaan Bahan/Material		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	10 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	10 Paket	10.000.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	30 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	30 Laporan	200.000.000	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	40.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	40.000.000	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	140.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	140.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	30.000.000	
2	Pengadaan Mebel		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10 Paket	50.000.000	Pengadaan Mebel		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10 Paket	50.000.000	
3	Pengadaan Aset Tak Berwujud		<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)</i>	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud		<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>	4 Unit	20.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	30.000.000	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	10.000.000	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	95.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	95.000.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	50.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	30.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	10.000.000	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	157.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	157.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	
	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					

N O	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CAT. ANALIS IS
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	100.000.000	
3	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan	10 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan	10 Unit	5.000.000	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.000.000	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.000.000	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	11 Poin	6.130.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	11 Poin	6.130.000.000	
IX	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	400 Orang	2.300.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	400 Orang	2.300.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Teknis Umum, inti dan Pilihan bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Teknis Umum, inti dan Pilihan bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	
2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum , Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum , Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	
3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	2.000.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	2.000.000.000	
RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					

N O	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CAT. ANALISIS
4	Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	3 Dokumen	150.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	3 Dokumen	150.000.000	
X	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi		3.080.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi		3.080.000.000	
			Jumlah Akreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi					Jumlah Akreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi			
			Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional					Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional			
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabaatan serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabaatan serta Jabatan Fungsional yang disusun	2 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabaatan serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabaatan serta Jabatan Fungsional yang disusun	2 Dokumen	150.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	100.000.000	
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	80 Orang	300.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	80 Orang	300.000.000	
4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan	250.000.000	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan	250.000.000	
5	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	5 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	5 Dokumen	50.000.000	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		<i>Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun</i>	3 Dokumen	30.000.000			<i>Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun</i>	3 Dokumen	30.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
6	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	200 Orang	2.100.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	200 Orang	2.100.000.000	
7	Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Dokumen	100.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Dokumen	100.000.000	
XI	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	120 Orang	750.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	120 Orang	750.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALIS IS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>	40 Orang	250.000.000			<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>	40 Orang	250.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>	40 Orang	250.000.000			<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>	40 Orang	250.000.000	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		<i>Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>	40 Orang	100.000.000			<i>Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>	40 Orang	100.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		<i>Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi</i>	1 Laporan	50.000.000			<i>Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi</i>	1 Laporan	50.000.000	

II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan (pokok-pokok pikiran), namun tidak dapat diakomodir karena bukan kewenangan kami di BPSDM dan tidak sesuai dengan arah kebijakan dalam Renstra melalui program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 adalah cerminan dari upaya merealisasikan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 serta mencerminkan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026. Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan

Disisi lain, Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Dalam hal ini program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 3 (tiga) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

1.1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB Memiliki *visi “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih,*

Kompeten dan Melayani” dan **misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”**. Hal ini dicapaidengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

1.2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah ***“Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”***.

1.3.

Sedangkan misinya adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi dan peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

1.3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi ***“Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Yang Profesional dan Berkesinambungan”*** yang dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu:

- a. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kediklatan;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- f. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 3 (tiga) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia aparatur pemerintah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah secara bertahap;
- d. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi;
- e. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai otonomi daerah menyiapkan peraturan - peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan aparatur;

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 2025

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai BPSDM Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik

2. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur

Sasaran yang ingin dicapai BPSDM Provinsi Sulawesi Barat pada RENJA Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPSDM dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPSDM
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Aparatur dengan indikator kinerja Nilai Indeks Profesionalitas ASN

3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana kerja (Renja) Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka BPSDM Provinsi Sulawesi Barat telah merumuskan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pada penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2025 dengan pagu rancangan awal sebesar Rp. 12.438.053.701 dialokasikan pada 2 Program, 11 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan. Dari jumlah pagu indikatif tersebut, jumlah pagu yang digunakan untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp. 5.098.053.701,- sedangkan untuk belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp. 7.340.000.000,-.

Sedangkan pada rancangan akhir Renja Tahun 2025, pagu indikatif belum ada, sehingga belum bisa menjadi cerminan sesungguhnya terhadap rencana kerja tahun 2025.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang. Berikut disajikan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 BPSDM Provinsi Sulawesi Barat.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASI ONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						12.438.053.701,00							0,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						12.438.053.701,00							0,00
	-	-						12.438.053.701,00							0,00
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	6.130.000.000,00						-	0,00
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	2.300.000.000,00			-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	0,00
	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Sem ua Kota /Kab , Sem ua Kec amat an, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00

	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				400 Orang	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				3 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	3.080.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	0,00
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional													

			<i>Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi													
			<i>Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi</i>				80 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar													
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar</i>				2 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga													

			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional													
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				3 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				200 Orang	2.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan													

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-	-			-	750.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	0,00
	5.04.02.1.03.0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri													
			<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>				40 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri													
			<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>				40 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00

	5.04.02.1.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri													
			<i>Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>				40 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.03.0004	Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri													
			<i>Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>				B Nilai Akreditasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
	5.04.02.1.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi													
			<i>Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		0,00
2.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	6.308.053.701,00						-	0,00
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	36.000.000,00			-	-	-	-	0,00
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.000.000,00	Sem ua Kota /Kab , Sem	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Sem ua Kota /Kab , Sem	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Sem ua Kota /Kab , Sem	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Sem ua Kota /Kab , Sem	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Sem ua Kota /Kab , Sem	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				7 Data	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Berita Acara	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.199.053.701,00			-	-	-	-	0,00
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/Bulan	5.098.053.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00

-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	11.000.000,00			-	-	-	-	0,00
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00

	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD												
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	306.000.000,00			-	-	-	0,00
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya												
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				56 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00

	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				40 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				60 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				40 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	357.000.000,00			-	-	-	0,00
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00

	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	140.000.000,00			-	-	-	0,00
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud												
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				4 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00
	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	-	-	-	0,00
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	169.000.000,00			-	-	-	-	0,00
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00
	J U M L A H							12.438.053.701,00							0,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Barat,



Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19690610 199503 1 012